

Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Rosmaida Sinaga¹ Ruth Debora Rumahorbo² Sitevis Ndruru³ Gabriel Pakpahan⁴
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rosmaidasinaga@unimed.ac.id¹ ruthrumahorbo03@gmail.com²
sitevisndruru@gmail.com³ gabrielpakpahan249@gmail.com⁴

Abstrak

Pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945 merupakan periode yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang membawa perubahan signifikan di berbagai bidang, termasuk politik, militer, sosial-ekonomi, dan Pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap penulisan diantaranya; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Meskipun kebijakan Jepang bertujuan untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mendukung upaya perang, dampaknya justru menjadi pemicu kebangkitan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Di bidang politik, pembubaran partai-partai dan pembentukan organisasi buatan Jepang membuka ruang bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk mempersiapkan perjuangan kemerdekaan. Di bidang militer, pelatihan militer bagi pemuda Indonesia melalui organisasi seperti PETA dan Seinendan membentuk generasi baru yang siap menghadapi penjajah. Eksploitasi dalam sistem kerja paksa Romusha dan penindasan sosial-ekonomi menimbulkan kesadaran kolektif akan perlunya kebebasan. Sementara itu, di bidang pendidikan, penghapusan diskriminasi dan penggunaan bahasa Indonesia memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda.

Kata Kunci: Pendudukan Jepang, Nasionalisme, Indonesia

Abstract

The Japanese occupation of Indonesia which lasted from 1942 to 1945 was a very influential period in the history of Indonesia's struggle for independence which brought significant changes in various fields, including politics, military, socio-economics and education. This type of research uses historical research methods which have five stages of writing including; heuristics, verification, interpretation and historiography. The results of this research show that although Japanese policy aimed to strengthen their power and support the war effort, its impact actually triggered the rise of nationalism among the Indonesian people. In the political field, the dissolution of parties and the formation of Japanese-made organizations opened up space for nationalist figures to prepare for the struggle for independence. In the military sector, military training for Indonesian youth through organizations such as PETA and Seinendan forms a new generation that is ready to face the invaders. Exploitation in the Romusha forced labor system and socio-economic oppression gave rise to a collective awareness of the need for freedom. Meanwhile, in the field of education, eliminating discrimination and using the Indonesian language strengthens national identity among the younger generation.

Keywords: Japanese Occupation, Nationalism, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada 8 Desember 1941, Jepang secara tiba-tiba menyerang Pearl Harbour, pangkalan angkatan laut Amerika di Pasifik. Setelah serangan tersebut, Jepang dengan cepat menyebar ke wilayah selatan, termasuk Indonesia. Pasukan Jepang tiba di Tarakan, Kalimantan Timur, pada 11 Januari 1942. Mereka kemudian menguasai Balikpapan (24 Januari), Pontianak (29 Januari), Samarinda (3 Februari), dan Banjarmasin (10 Februari). Jepang juga merebut Ambon pada 4

Februari dan Palembang pada 16 Februari 1942. Setelah menguasai wilayah-wilayah luar Jawa, Jepang melanjutkan invasi ke Pulau Jawa. Pada 28 Februari 1942, mereka mendarat di tiga titik sekaligus: Teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kragen (Jawa Tengah) (Kurawasa, 2015). Pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) menandai periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun hanya berlangsung selama tiga tahun, dampak pendudukan Jepang sangat besar dalam membentuk kesadaran nasional dan mempercepat gerakan menuju kemerdekaan. Sebelum kedatangan Jepang, Indonesia telah berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari tiga abad, dengan sistem kolonial yang mengekang potensi pergerakan nasional. Jepang, yang memasuki Indonesia dengan propaganda "Asia untuk Asia" dan menggambarkan diri mereka sebagai "pembebas" dari kolonialisme Eropa, membawa dinamika baru dalam hubungan penjajah-terjajah di kepulauan ini. Meskipun pada akhirnya Jepang tetap bertindak sebagai penjajah, kebijakan dan tindakan mereka berkontribusi pada lahirnya kesadaran nasional yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia (Sumarno, A.J. 1991).

Sebelum kedatangan Jepang, Indonesia telah berada di bawah penjajahan Belanda yang bersifat sangat eksploitatif dan represif. Pada awal abad ke-20, muncul kesadaran nasional melalui berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, Belanda dengan cepat menekan gerakan-gerakan ini melalui kebijakan represif seperti Politik Etis, yang meskipun dimaksudkan untuk memberikan sedikit perbaikan bagi kaum pribumi, pada kenyataannya tetap mempertahankan supremasi kolonial. Setiap gerakan yang bersifat radikal segera ditindas oleh Belanda, dan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir sering kali dipenjarakan atau diasingkan (Suhartono, 1994). Dengan latar belakang ini, kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme oleh sebagian rakyat Indonesia, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk keluar dari cengkeraman kolonialisme Belanda. Namun, antusiasme ini segera berubah menjadi kekecewaan karena Jepang, pada akhirnya, hanya menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah baru. Pendudukan Jepang membuka jalan bagi kebangkitan nasionalisme Indonesia melalui beberapa cara kunci, mulai dari pembentukan organisasi militer dan politik hingga pemanfaatan tokoh-tokoh nasionalis untuk memperkuat kontrol atas rakyat. Semua ini secara tidak langsung menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap penulisan diantaranya; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 1980: 89). Tahap pertama yakni heuristik, mencari dan mengumpulkan data-data masa lampau melalui literatur (sumber buku) yang memuat informasi terkait topik yang dibahas. Tahap kedua yakni verifikasi atau melakukan kritik terhadap sumber yang diperoleh. Tahap ketiga yakni interpretasi, mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang lain sehingga membentuk rangkaian peristiwa sejarah dan penafsiran terhadap sumber yang digunakan, Tahap terakhir yakni historiografi atau penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Dalam Bidang Politik

Setelah Jepang menduduki Indonesia, kebijakan pertama mereka adalah melarang berkumpul. Jepang membubarkan semua organisasi politik pergerakan nasional dan partai-partai Hindia Belanda, kecuali MIAI. MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi. Responnya, para tokoh pergerakan nasional Indonesia mengambil sikap kerja sama terhadap kebijakan Jepang saat itu. Jepang kemudian membangun wadah organisasi langsung di bawah pengawasan Jepang. Banyak tokoh pergerakan nasional bergabung dengan organisasi yang

didirikan oleh Jepang sebagai tanggapan atas sikap atau respons dari para tokoh tersebut (Ricklef, 2008). Sebenarnya pemerintahan militer Jepang bersifat otoriter. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah membagi menjadi beberapa bagian. Tentara ke-16 berpusat di Jakarta (dulu Batavia), tentara ke-25 berpusat di Sumatera, tentara ke-25 berpusat di Bukittinggi (Sumbar), dan tentara ke-2 (Angkatan laut) berpusat di Indonesia bagian timur, dengan pusatnya di Makasar (Sulsel). Pemerintahan darat dikenal sebagai Gunseibu, dan pemerintah laut dikenal sebagai Minseibu. Masing-masing wilayah dibagi menjadi lebih banyak distrik yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa terdiri dari tiga Provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, bersama dengan dua wilayah istimewa: Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini dihapus karena dianggap tidak efektif. Pada akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 Karesidenan (Syu), masing-masing dipimpin oleh seorang Residen (Syucokan). Karesidenan terdiri dari dan Kotapraja (Syi). Kebijakan politik yang dikenal termasuk: 1) Pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan Inggris tetapi tetap menggunakan bahasa Jepang; 2) Pembentukan gerakan tiga A; 3) Membagi kekuatan militer Jepang di Indonesia menjadi tiga bagian; 4) Perubahan struktur birokrasi pemerintahan menjadi pemerintahan sipil dan militer; 5) Menerima umat Islam Indonesia; dan 6) Menciptakan organisasi politik buatan Jepang dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional (Muttaqin, dkk, 2011).

Dampak Dalam Bidang Militer

Untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang yang semakin mendesak selama perang Pasifik, militer Jepang mendirikan organisasi pergerakan berbasis militer. Pada tahun 1943, Jepang semakin gencar memberikan pendidikan dan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia. Karena keadaan di medan perang Asia-Pasifik semakin sulit bagi Jepang. Dengan demikian, Jepang memperkuat kekuatan dengan memanfaatkan siswa dan pemuda Indonesia sebagai potensi kekuatan yang dapat digunakan dalam pertempuran melawan Sekutu. Dengan demikian, Jepang menciptakan gerakan-gerakan berbasis militer sebagai berikut: 1) Seinendan, yang merupakan barisan pemuda berusia 14-22 tahun; 2) Losyi Seinendan, yang merupakan barisan cadangan tau seinendan putri; 3) Bakutai, yang merupakan pasukan berani mati; dan 4) Keibodan, yang merupakan barisan bantu polisi yang anggotanya berusia 23 tahun atau lebih. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hokokudan; 5) Hizbullah, yaitu barisan semimiliter untuk orang Islam 6) Heiho, yang merupakan pembantu prajurit Jepang berusia 18 hingga 25 tahun; 7) Jawa Sentotai/Hokokai, yang merupakan benteng perjuangan Jawa; 8) Suisyintai, yang merupakan barisan pelopor; 9) Peta atau Pembela Tanah Air, yang merupakan tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei No. 44 tanggal 23 Oktober 1943 (Zulkarnain, 2012).

Dampak Dalam Bidang Sosial-Ekonomi

Kinrohosi, atau kerja bakti, adalah gerakan sosial yang dilakukan pemerintah Jepang, yang akhirnya mengarah pada kerja paksa hanya untuk kepentingan perang. Jumlah buruh yang besar yang diperlukan saat wilayah pendudukan Jepang semakin luas untuk membangun sarana pertahanan seperti kubu, lapangan udara, jalan raya, dan gudang bawah tanah. Kegiatan ini menggunakan sistem kerja paksa, yang dikenal sebagai Romusha, karena tenaga kerja diperoleh dari desa-desa Jawa yang padat penduduknya. Pada awalnya mereka melakukannya secara sukarela, tetapi mereka secara bertahap terdesak oleh perang pasifik sehingga semua Romukyokai yang ada di setiap desa ditugaskan. Kondisi kerja yang sulit dan kekurangan nutrisi dan kesehatan yang mencukupi menyebabkan banyak pekerja Romusha yang tidak kembali ke pekerjaan mereka (Istifaroh, 2014). Penipuan terhadap gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur (juga dikenal sebagai jugun lanfu) dan disekap di tempat tertutup adalah praktik eksploitasi pergerakan sosial lainnya. Pada awalnya, para gadis digambarkan sebagai perawat,

pelayan toko, dan disekolahkan. Namun, pada akhirnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat tentara Jepang di beberapa daerah seperti Solo, Semarang, dan Jakarta. Selama pemerintahan Jepang di Indonesia, sistem birokrasi Jepang diterapkan, mengubah institusi sosial di berbagai wilayah (Astrid, dkk, 2020). Dalam bidang ekonomi Pemerintah Jepang membuat kebijakan yang pada dasarnya berfokus pada pengumpulan bahan mentah untuk industri perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan dilakukan dalam dua tahap: tahap penguasaan dan tahap penyusunan kembali struktur. Pada masa kekuasaan, Jepang mengambil alih pabrik gula milik Belanda dan memberikannya kepada perusahaan swasta Jepang seperti Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Selama tahap rekonstruksi, atau penyusunan kembali struktur, Jepang menetapkan kebijakan-kebijakan berikut. 1) Sistem autarki (rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mendukung kepentingan perang Jepang); 2) Sistem tonarigumi (rukun tetangga yang terdiri dari 10-20 KK untuk mengumpulkan setoran untuk Jepang); 3) Memopoli hasil perkebunan yang dikeluarkan oleh Gunseikan; 4) Adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang (Zulkarnain, 2012).

Dampak Dalam Bidang Pendidikan

Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam pendidikan. Pada masa Belanda, rakyat kecil tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal, hanya rakyat pribumi untuk kalangan menengah ke atas. Jadi, ketika Jepang mulai menerapkan sistem pendidikan, setiap orang dari lapisan sosial mana pun berhak mendapatkan pendidikan formal. Sistem pendidikan dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan perang. Maka dari itu siswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran dan belajar lagu kebangsaan Jepang. Para Guru diminta untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah, bukan bahasa Belanda. Untuk alasan ini, para guru harus mengikuti kelas bahasa Jepang. Selain itu, hal yang menarik adalah bagaimana Jepang memaksa orang Indonesia untuk menghormati Seikerei, dewa matahari. Lagu Kebangsaan Jepang (Kimigoyo) biasanya dinyanyikan setelah penghormatan (Fadli, dkk, 2019).

Dampak Dari Kebijakan Jepang Terhadap Kebangkitan Nasionalisme Indonesia Bidang Politik

Salah satu kebijakan pertama Jepang setelah menduduki Indonesia adalah melarang aktivitas berkumpul dan membubarkan semua organisasi politik pergerakan nasional serta partai-partai Hindia Belanda, kecuali organisasi Islam MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia). Kebijakan ini bertujuan untuk menekan aktivitas politik yang bisa mengancam dominasi Jepang di Indonesia. Namun, langkah ini justru memicu perubahan strategi dari para tokoh pergerakan nasionalis. Sebagai respons terhadap pelarangan tersebut, para tokoh nasionalis memilih untuk bekerja sama dengan Jepang. Kerjasama ini bukan bentuk dukungan penuh terhadap pendudukan, melainkan strategi untuk tetap terlibat dalam struktur politik yang ada dan memanfaatkan kesempatan untuk memobilisasi rakyat serta memperkuat pengaruh nasionalisme. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi buatan Jepang dapat memberikan ruang bagi pergerakan nasionalis untuk tumbuh dan berkembang (Ricklef, 2008). Pembentukan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang menggantikan MIAI, adalah salah satu contoh dari strategi Jepang untuk mengendalikan organisasi politik, khususnya yang berbasis Islam. Namun, pengakuan Jepang terhadap Islam dan pembentukan Masyumi juga memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh Islam untuk terlibat dalam politik secara lebih langsung dan memperluas jaringan mereka, yang di masa depan akan memainkan peran penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun Jepang berusaha mengendalikan

politik Indonesia, kebijakan ini malah membuka ruang bagi pemimpin nasionalis untuk memperkuat basis kekuatan mereka.

Jepang juga membentuk organisasi-organisasi politik sebagai bagian dari strategi untuk mengontrol rakyat Indonesia. Salah satu organisasi pertama yang dibentuk adalah Gerakan Tiga A dengan slogan "Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia." Gerakan ini merupakan propaganda yang dirancang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dan memperkuat posisi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Namun, Gerakan Tiga A mengalami kegagalan karena tidak berhasil menarik dukungan rakyat Indonesia. Slogan-slogan yang diusung dianggap tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan, di mana rakyat Indonesia lebih menginginkan kemerdekaan daripada sekadar mendukung Jepang sebagai pemimpin regional. Kegagalan Gerakan Tiga A menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah memiliki kesadaran politik yang lebih maju dan mulai mempertanyakan bentuk penjajahan baru yang dilakukan oleh Jepang. Sebagai pengganti Gerakan Tiga A, Jepang kemudian membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) pada tahun 1943, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis terkemuka seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Putera memberikan ruang bagi para pemimpin nasionalis untuk lebih terlibat dalam politik dan menggerakkan rakyat. Meski tujuan utama Jepang adalah memobilisasi tenaga rakyat Indonesia untuk mendukung upaya perang, para pemimpin nasionalis berhasil memanfaatkan organisasi ini untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme. Mereka menggunakan Putera sebagai platform untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan memobilisasi dukungan luas di kalangan rakyat Indonesia, yang akan sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan di kemudian hari (Muttaqin, dkk, 2011).

Bidang Militer

Melalui berbagai organisasi militer seperti Seinendan, Keibodan, dan Heiho, pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan militer yang intensif, termasuk keterampilan bertempur, taktik militer, dan disiplin. Pelatihan militer ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis kepada para pemuda, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, dan kesadaran akan pentingnya pertahanan negara. Banyak dari pemuda yang terlibat dalam organisasi-organisasi ini nantinya menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi perwira militer dalam TNI setelah Indonesia merdeka. Pengalaman militer ini membekali mereka dengan pengetahuan tentang strategi militer dan penggunaan senjata, yang kemudian sangat berguna ketika mereka harus memimpin perlawanan terhadap Jepang dan Sekutu setelah proklamasi kemerdekaan. Organisasi seperti PETA bahkan menjadi cikal bakal angkatan bersenjata Indonesia yang terorganisir, dan para veteran PETA memainkan peran penting dalam perang kemerdekaan melawan Belanda pada tahun 1945-1949 (Zulkarnain, 2012).

Pembentukan berbagai organisasi militer oleh Jepang secara tidak langsung memperkuat kesadaran nasional di kalangan pemuda Indonesia. Meskipun tujuan utama Jepang adalah untuk memanfaatkan pemuda Indonesia dalam perang, banyak di antara para pemuda yang mulai menyadari pentingnya persatuan nasional dan pembelaan terhadap tanah air. Keterlibatan dalam organisasi militer membuat mereka merasakan solidaritas dan kebersamaan dalam upaya mempertahankan tanah air mereka dari penjajah, meskipun dalam konteks yang diawasi oleh Jepang. PETA, sebagai salah satu organisasi militer paling signifikan, memberikan ruang bagi para pemuda untuk mengidentifikasi diri sebagai pembela tanah air, bukan hanya sebagai alat Jepang (Moedjanto, G., 1988). Loyalitas kepada Indonesia mulai tumbuh, dan konsep mempertahankan kedaulatan bangsa menjadi semakin kuat. Hal ini menyebabkan anggota PETA mulai mengembangkan kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan, dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap masa depan

bangsa. Organisasi-organisasi seperti PETA dan Heiho menjadi sarana yang efektif bagi Jepang untuk melatih pemuda Indonesia secara militer. Namun, pelatihan militer yang diberikan kepada pemuda-pemuda ini menjadi senjata makan tuan bagi Jepang. Banyak di antara mereka yang kemudian menggunakan pelatihan militer tersebut untuk melawan Jepang dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. PETA, misalnya, melahirkan para pemimpin militer yang kemudian menjadi tokoh penting dalam revolusi kemerdekaan, seperti Soedirman yang kelak menjadi Panglima Besar TNI. Selain itu, pengalaman dalam organisasi semi-militer seperti Hizbullah juga memperkuat hubungan antara pergerakan nasionalis dan pemimpin-pemimpin Islam. Para pemuda yang dilatih melalui Hizbullah bukan hanya terlibat dalam aktivitas militer, tetapi juga dalam gerakan-gerakan nasionalis berbasis agama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Pelatihan militer yang diberikan Jepang juga mempersiapkan pemuda Indonesia untuk melakukan perlawanan fisik ketika momentum kemerdekaan tiba. Pada tahun-tahun terakhir pendudukan Jepang, ketika kekuatan Jepang mulai melemah, banyak anggota PETA dan organisasi militer lainnya yang mulai bersiap untuk mengambil alih kekuasaan. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, pemuda-pemuda yang telah dilatih oleh Jepang ini memainkan peran kunci dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945, yang dipimpin oleh Supriyadi, merupakan contoh nyata bagaimana semangat nasionalisme yang tumbuh dari pelatihan militer Jepang dapat berbalik melawan Jepang itu sendiri. Meskipun pemberontakan ini gagal, ia menunjukkan bahwa pelatihan militer yang diberikan Jepang tidak serta-merta menghasilkan kesetiaan kepada Jepang, tetapi justru meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pemuda Indonesia.

Bidang Sosial-Ekonomi

Salah satu kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia adalah sistem Romusha, yaitu kerja paksa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia, terutama dari Jawa, untuk mendukung pembangunan infrastruktur militer Jepang. Pada awalnya, kebijakan ini dimulai dengan gerakan sosial yang disebut Kinrohosi (kerja bakti), yang bertujuan untuk menggerakkan tenaga kerja secara sukarela dalam pembangunan sarana pertahanan (Istifaroh, 2014). Dampak dari eksploitasi ini terhadap kebangkitan nasionalisme Indonesia sangat signifikan. Eksploitasi yang dilakukan Jepang meningkatkan rasa ketidakadilan dan penderitaan di kalangan rakyat Indonesia, terutama karena mereka dipaksa bekerja keras untuk kepentingan penjajah, sementara kondisi ekonomi dan sosial mereka sendiri semakin memburuk. Ketidakadilan ini membangkitkan kesadaran nasional bahwa penjajahan hanya membawa penderitaan, dan bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penindasan tersebut.

Selain eksploitasi tenaga kerja melalui Romusha, kebijakan sosial-ekonomi Jepang juga melibatkan eksploitasi perempuan Indonesia, yang dikenal dengan praktik Jugun Ianfu. Eksploitasi seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia selama pendudukan Jepang menjadi simbol dehumanisasi yang dialami rakyat Indonesia secara umum di bawah pemerintahan militer Jepang (Astrid, dkk, 2020). Praktik ini menimbulkan rasa malu, kemarahan, dan penderitaan yang mendalam, terutama di kalangan perempuan dan keluarga mereka. Penderitaan ini menjadi salah satu pendorong emosi sosial yang mempercepat kebangkitan nasionalisme, di mana rakyat Indonesia semakin menyadari bahwa penjajahan, dalam bentuk apa pun, tidak dapat diterima karena hanya membawa penderitaan fisik dan mental. Pengalaman tragis yang dialami oleh Jugun Ianfu juga menumbuhkan solidaritas gender di antara perempuan Indonesia, yang kemudian turut mendukung gerakan nasionalisme. Perempuan mulai terlibat dalam gerakan sosial dan politik, menyuarkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kemerdekaan nasional. Keterlibatan perempuan dalam

pergerakan nasional ini menunjukkan bahwa eksploitasi yang dilakukan Jepang tidak hanya memicu kebangkitan nasionalisme di kalangan pria, tetapi juga melibatkan perempuan sebagai bagian integral dari perjuangan kemerdekaan.

Bidang Pendidikan

Ketika Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia serta bahasa Jepang, bahasa Indonesia mendapatkan status resmi dan pengakuan yang lebih tinggi dalam sistem Pendidikan (Fadli, dkk, 2019). Meskipun langkah ini dilakukan oleh Jepang untuk kepentingan praktis dan politik mereka sendiri, dampak jangka panjangnya adalah peningkatan rasa identitas nasional di kalangan rakyat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah memperkuat ikatan budaya di antara masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan latar belakang sosial. Bahasa Indonesia semakin dikenal sebagai simbol persatuan dan alat untuk mencapai tujuan bersama, termasuk perjuangan kemerdekaan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan juga memungkinkan generasi muda untuk mengakses dan memahami ide-ide nasionalisme yang berkembang saat itu. Buku-buku dan bahan ajar yang menggunakan bahasa Indonesia memudahkan penyebaran gagasan kebangsaan dan semangat perlawanan terhadap penjajahan.

Dalam upaya memperkuat kontrol ideologis mereka atas rakyat Indonesia, Jepang juga memperkenalkan kewajiban untuk menghormati Seikerei, yaitu penghormatan kepada dewa matahari, dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, di sekolah-sekolah (Fadli, dkk, 2019). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membentuk loyalitas ideologis di kalangan rakyat Indonesia terhadap Jepang dan Kaisar Hirohito. Setiap siswa diwajibkan untuk melakukan penghormatan kepada dewa matahari dan menyanyikan Kimigayo sebagai bagian dari rutinitas sekolah. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Alih-alih membangkitkan loyalitas kepada Jepang, kebijakan ini sering kali menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, terutama yang beragama Islam, merasa bahwa pemaksaan untuk menghormati Seikerei bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Kewajiban ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap keyakinan dan identitas mereka, sehingga menimbulkan resistensi kultural yang lebih besar terhadap pendudukan Jepang. Rasa ketidakpuasan ini, meskipun bersifat kultural dan religius, berkontribusi pada meningkatnya semangat perlawanan terhadap Jepang, baik dalam bentuk pasif maupun aktif. Ketidakpuasan terhadap dominasi budaya asing menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh, termasuk dalam menentukan nilai-nilai kultural dan religius yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Dengan demikian, upaya Jepang untuk membentuk loyalitas ideologis justru menjadi pemicu bagi tumbuhnya kesadaran nasionalisme yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945 membawa perubahan besar di berbagai sektor, baik politik, militer, sosial-ekonomi, maupun pendidikan. Meskipun Jepang memiliki tujuan utama untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mendukung upaya perang Asia-Pasifik, kebijakan dan tindakan mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Dampak dari setiap kebijakan ini, meski awalnya bertujuan untuk memperkuat kedudukan Jepang, justru membentuk dasar kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat Indonesia yang kelak memuncak dalam perjuangan kemerdekaan. Di bidang politik, kebijakan Jepang yang awalnya bersifat represif, seperti pelarangan berkumpul dan pembubaran partai-partai politik, diimbangi dengan pembentukan organisasi-organisasi baru seperti Gerakan Tiga A, Masyumi, dan organisasi politik buatan Jepang lainnya. Walaupun organisasi-organisasi ini berada di bawah pengawasan Jepang,

keikutsertaan tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam organisasi tersebut memberi ruang bagi mereka untuk mempersiapkan diri dan jaringan yang lebih kuat dalam menghadapi era pasca-kolonial. Kolaborasi sementara ini, meski terkesan bekerja sama dengan penjajah, justru dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk membentuk kesadaran kolektif dan menyusun strategi menuju kemerdekaan. Di bidang militer, pendudukan Jepang memperkenalkan berbagai organisasi militer seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan PETA (Pembela Tanah Air), yang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia. Pelatihan militer ini mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan taktis dan disiplin militer yang kemudian sangat berguna dalam perjuangan bersenjata melawan penjajah. Pengalaman dalam organisasi militer bentukan Jepang memperkuat kesadaran akan kekuatan kolektif dan membangkitkan semangat untuk mempertahankan tanah air, yang nantinya dimanfaatkan dalam Revolusi Nasional Indonesia. Di bidang sosial-ekonomi, kebijakan kerja paksa Jepang melalui sistem Romusha dan eksploitasi sumber daya manusia Indonesia, meskipun pada awalnya dilakukan secara sukarela, semakin lama menunjukkan sisi brutal dari pendudukan Jepang. Eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat melalui kerja paksa, serta penindasan terhadap kaum perempuan melalui praktik jugun ianfu (wanita penghibur), menimbulkan penderitaan yang mendalam dan menyulut rasa perlawanan di kalangan rakyat. Ketidakpuasan yang meluas ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya kebebasan dari penindasan asing, memperkuat semangat nasionalisme dan keinginan untuk lepas dari segala bentuk penjajahan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan Jepang yang memperluas akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, menghapus diskriminasi dalam pendidikan, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, memberikan momentum bagi perkembangan nasionalisme. Meskipun kurikulum diarahkan untuk mendukung upaya perang Jepang, generasi muda Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, generasi baru mulai melihat pendidikan sebagai alat untuk memahami situasi politik dan sosial, sekaligus untuk membangun kesadaran akan identitas nasional. Pelatihan militer di sekolah juga memberikan disiplin dan keterampilan yang memperkuat kesiapan mereka untuk berjuang demi kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Dwi Rahma, Suswandari, Hari Naredi. (2020). *Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang Di Jawa Barat Tahun 1942-1945*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Epriwina Nurrahma. (2023). *Menolak Sarkas: Mengenal Secarik Dampak Positif Dari Kebijakan Pendudukan Jepang Di Indonesia Sebagai Sumber Belajar Siswa*. *Jurnal Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*.
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189-205.
- Istifarah, A. (2014). *Kebijakan Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945*.
- Kuntowijoyo, 1980, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di Jawa (Perubahan Sosial di Perdesaan 1942-1945)*. Diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyono. Depok: Komunitas Bambu.
- Moedjanto, G., 1988, *Indonesia Abad 20 Jilid 1*, Yogyakarta: Kanisius.
- Muttaqin, Dkk. (2011). *Sejarah Pergerakan Nasional*. Bandung: Humaniora.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Suhartono, 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Sumarno, A.J. 1991. Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press
- Zulkarnain. (2012). Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pujangga Press